



**Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran  
(Studi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulau Morotai)**

**Ardin Umar<sup>1</sup>, Jamiludin Hasan<sup>2</sup>, Saiful Tanimbar<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi Universitas Pasifik Morotai

Email: [umarardin1@gmail.com](mailto:umarardin1@gmail.com), [arfarabijamiludin@gmail.com](mailto:arfarabijamiludin@gmail.com)

---

**Info Artikel**

Sejarah Artikel:

Diterima: 30 Juni 2021

Direvisi: 29 Juli 2021

Dipublikasikan: Agustus 2021

e-ISSN: 2089-5364

DOI: 10.5281/zenodo.5171546

---

**Abstract:**

*The results revealed that the efficiency ratio analysis results showed an average efficiency in managing the Morotai Island Regional Disaster Management Agency's budget management from 2017 to 2019 of 1.16%. Thus, it can be concluded that efficient budget management has been implemented. The effectiveness ratio analysis results showed the average effectiveness of budget management of the Morotai Island Regional Disaster Management Agency from 2017 to 2019 was 97.27%, meaning that budget management was applied.*

**Keywords:** *Efficiency, Effectiveness, Budget Management.*

---

**PENDAHULUAN**

4.0 yang semakin maju, mendorong manusia untuk hidup lebih modern dan lebih efisien. Seiring dengan berkembangnya penelitian teknologi industri menuntut adanya peningkatan efisiensi dan efektifitas produksi. Setiap proses produksi harus memenuhi indikator-indikator yang ditentukan seperti kecepatan, ketepatan, serta kepresisian produksi. Demi memenuhi persyaratan tersebut dapat diciptakan teknologi yang dapat berfungsi sebagai layaknya buruh atau pekerja manusia. Oleh sebab itu, di ciptakanlah suatu sistem kontrol otomatis yang berfungsi untuk mempermudah pekerjaan manusia Prasetyo & Sutopo, 2018).

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan pada bulan maret 2020. Proses perbaikan *engine* (service) motor di beberapa dealer atau bengkel masih menggunakan beberapa metode manual untuk mengerjakan perbaikan motor. Proses perbaikan tersebut melalui beberapa tahapan pengerjaan yang salah satu prosesnya adalah pencucian untuk *cylinder block* motor. Tahapan pencucian yang dilakukan oleh *dealer* atau bengkel pada umumnya masih menggunakan metode pencucian manual, yaitu melakukan proses pencucian dengan cara mencelupkan dan menyikat *cylinder block* yang akan dibersihkan ke dalam cairan (bensin), lalu dikeringkan dengan menggunakan handuk kotor saja. Metode tersebut tidak efisien, karena sisa

geram dan oli masih tertinggal pada *cylinder block*.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pulau Morotai sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi dan tugas pembantuan di bidang kebencanaan. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, tentu harus berdasar pada prinsip-prinsip efisiensi dalam sumber dana dan pemanfaatan seoptimal mungkin teknologi yang dimiliki sehingga dapat terwujud efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran, baik dari sudut produksi, konsumsi, maupun distribusi yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja BPBD Kabupaten Pulau Morotai. Salah satunya yaitu dengan membuat rencana anggaran.

Rencana anggaran diperlukan manajemen untuk dapat menjabarkan perencanaan, pengawasan, pengendalian, koordinasi dan sebagai pedoman kerja secara sistematis. Selain itu anggaran juga berfungsi untuk mengetahui segala bentuk penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan penting untuk meningkatkan tanggung jawab dari masing-masing pengelola keuangan. Di lingkungan BPBD Kabupaten Pulau Morotai setiap tahunnya juga membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB), agar dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas. RAPB tersebut, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan beberapa hal yaitu: (1) Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai; (2) Penetapan prioritas kegiatan dan perhitungan beban kerja. (Harun, 2009)

Fenomena yang terkait dengan penganggaran pada BPBD Kabupaten Pulau Morotai masih memprihatinkan terutama pengeluaran yang belum mampu mendukung prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang akuntabilitas, transparan, *value of money*. Pengelolaan keuangan yang tidak sesuai kebutuhan dan skala prioritas dan masih kurang mencerminkan aspek efisiensi dan efektivitas karena

kualitas perencanaan anggaran relatif lemah. Lemahnya perencanaan anggaran juga diikuti dengan ketidakmampuan untuk meningkatkan penerimaan secara berkesinambungan. Sementara itu, pengeluaran terus meningkat sehingga mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas pada BPBD Kabupaten Pulau Morotai.

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari rencana kerja pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumber daya, sementara arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan anggaran secara efisien dan efektif. Pengelolaan anggaran harus dapat dilakukan secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan dan manfaat. Oleh karena itu, dalam rangka pertanggungjawaban publik, maka BPBD Kabupaten Pulau Morotai wajib melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara efisien dan efektif guna mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dimaksudkan sebagai kajian terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang menjalankan roda pemerintahan, pembangunan ekonomi, dan pelayanan masyarakat, khususnya pada BPBD Kabupaten Pulau Morotai dalam hal menganalisis efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggarannya.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif yaitu menguraikan dan menganalisis efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran pada kantor dinas BPBD Kabupaten Pulau Morotai.

### **Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian selama 2 (dua) bulan, mulai Juni sampai Agustus 2020.

Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor dinas BPBD Kabupaten Pulau Morotai yang merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah yang bertugas dalam bidang Bencana Daerah.

### Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dalam penulisan skripsi ini:

1. Memperoleh gambaran umum dan permasalahan yang ada mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas peneglolaan keuangan daerah Daerah BPBD Kabupaten Pulau Morotai.
2. Memperoleh data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah BPBD Kabupaten Pulau Morotai.
3. Menghitung Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah BPBD Kabupaten Pulau Morotai
4. Mengitung efektivitas Pengelolaan Keuangan DaerahDaerah BPBD Kabupaten Pulau Morotai.

### Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan.Kuncoro (2009) menyatakan jenis data dapat dibedakan menjadi.

1. Data Kuantitatif, adalah data yang diukur dalam suatu skala numeric.
2. Data Kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik.

Statistik semua data harus dalam bentuk angka, maka data kualitatif umumnya dikuantitatifkan agar data dapat diproses lebih lanjut.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang dibahas.Teknik pengumpulan data tersebut adalah melalui dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menelaah serta memperoleh informasi melalui buku-buku, publikasi, laporan, serta dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian.

### Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu suatu metode pembahasan yang sifatnya

menguraikan, menggambarkan, membandingkan, dan menerangkan suatu data atau keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang relevan dengan teori.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Efisiensi Pengelolaan Anggaran Pada BPBD Kab. Pulau Morotai

Menurut Mahmudi (2007), efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input. Output merupakan realisasi belanja Pegawai untuk memperoleh penerimaan daerah dan input merupakan realisasi dari penerimaan daerah dalam hal ini adalah pendapatan. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 (seratus) persen.BPBD melakukan kegiatan fasilitasi kemudahan melakukan tugas kedinasan. Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran pada BPBD Kabupaten Pulau Morotai selama tahun 2017 sampai 2019 tersebut.

Rumus Efisiensi =	Rasio Efisiensi =	Rasio Efisiensi =	Rasio Efisiensi =
	$\frac{\text{Target Anggaran}}{\text{Realisasi Anggaran}} \times 100\%$		
1.	$\frac{12.187.782.425,00}{11.854.599.000,00} \times 100\%$	=	1,03%
2.	$\frac{9.834.404.651,00}{9.621.419.667,00} \times 100\%$	=	1,02%
3.	$\frac{15.167.726.000,00}{13.130.014.000,00} \times 100\%$	=	1,16%

Tabel 1. Rasio Efisiensi Pengelolaan Anggaran pada BPBD Kab. Pulau Morotai Tahun 2017-2019.

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Rasio Efisiensi	Kriteria
2017	12.187.782.425,00	11.854.599.000,00	1,03 %	Sangat Efisien
2018	9.834.404.651,00	9.621.419.667,00	1,02 %	Sangat Efisien
2019	15.167.726.000,00	13.130.014.000,00	1,16 %	Sangat Efisien

Sumber: Data sekunder 2021.

Tabel di atas menunjukkan bahwa rasio efisiensi pengelolaan anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengalami fluktuasi selama tahun 2017-2018. Pada tahun 2017 rasio efisiensi 1,03% dan memiliki kriteria sangat efisien. Pada tahun 2018 rasio efisiensi 1,02% tetap masih pada kriteria sangat efisien dan pada tahun 2019 rasio efisiensi 1,16% dan masuk dalam kriteria sangat efisien. Secara keseluruhan, pengelolaan anggaran BPBD Kab.Pulau Morotai Tahun 2017 sampai tahun 2019 sudah efisien dengan rasio efisiensi dibawah 60%.

### Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pada BPBD Kab. Pulau Morotai.

Anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan. BPBD Kabupaten Pulau Morotai akan dinilai baik kinerjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan. Laporan realisasi anggaran dapat diketahui secara langsung besarnya anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentasinya.

Menurut Mahmudi (2010), selisih anggaran belanja dikategorikan menjadi dua jenis yaitu: selisih disukai (*favourable variance*) yaitu realisasi belanja yang lebih dari anggarannya, dan selisih tidak disukai (*unfavourable variance*) yaitu realisasi belanja yang lebih besar dari anggarannya. Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektifitas pengelolaan anggaran belanja pada BPBD Kabupaten Pulau Morotai selama tahun 2017 sampai 2019 tersebut.

Rumus Efektifitas =

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Realisasi Anggaran}} \times 100\%$$

1.  $\frac{5.813.423.199,00}{4.925.735.648,00} \times 100\% = 84,73\%$
2.  $\frac{4.944.353.964,00}{4.330.815.927,00} \times 100\% = 87,59\%$
3.  $\frac{7.118.902.949,00}{6.924.238.242,00} \times 100\% = 97,27\%$

Tabel 2. Rasio Efektifitas Pengelolaan Anggaran pada BPBD Kab.Pulau Morotai Tahun 2017-2019.

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Rasio Efektifitas	Kriteria
2017	5.813.423.199	4.925.735.648	84,73	Cukup Efektif
2018	4.944.353.964	4.330.815.927	87,59	Cukup Efektif
2019	7.118.902.949	6.924.238.242	97,27	Efektif

Sumber: Data Sekunder 2021.

Tabel di atas menunjukkan bahwa rasio efektifitas pengelolaan anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengalami fluktuasi selama tahun 2017-2018. Pada tahun 2017 tingkat efektivitas 84,73% (Cukup Efektif). Kemudian ditahun selanjutnya 2018, tingkat efektivitas mengalami kenaikan menjadi 87,59% (Cukup Efektif). Selanjutnya pada tahun 2019 menjadi tahun yang tingkat efektivitasnya tertinggi selama kurun waktu 2017-2018 yaitu 97,27% (Efektif).

### PEMBAHASAN

1. Pengelolaan anggaran belanja sudah memenuhi syarat efisiensi, yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil maksimum.
2. Hasil perhitungan tingkat efektivitas pengelolaan anggaran belanja BPBD Kabupaten Pulau Morotaiterus berfluktuasi dari tahun ketahun, kadang mengalami peningkatan kadang mengalami penurunan. Naik turunnya tingkat efektivitas anggaran belanja disebabkan dimana realisasi anggaran yang dicapai telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Dari masalah yang ditimbulkan ini, solusi agar supaya tingkat efektivitas anggaran belanja bisa efektif, harus adanya koordinasi

dan kerja sama yang baik antara setiap bidang-bidang dan para tenaga kerja agar dapat merealisasikan target anggaran dari perencanaan setiap program. Agar dapat merealisasikan target anggaran dari setiap program, harus adanya pengawasan yang baik atas penyusunan program dan anggaran dari manajemen BPBD Kabupaten Pulau Morotai agar keseluruhan perencanaan dari setiap program dan penganggarannya bisa terealisasi sesuai target yang direncanakan, pengawasan ini berguna untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dilapangan agar perencanaan program dapat segera diperbaiki dan disusun secara akurat.

3. Tahun 2017 dan 2019 rasio efektifitasnya dalam kategori cukup karena realisasi anggaran belanja memiliki perbedaan yang jauh dengan target anggaran belanja yang harus dicapai. Perbedaan ini terjadi karena ada beberapa kegiatan yang dianggarkan tidak terlaksana. Pada tahun 2017 target anggaran belanja BPBD Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp. 12.187.782.425,00 yang direalisasi sebesar Rp. 11.854.599.000,00 selisih anggaran belanja sebesar Rp. 333.183.425,00. Anggaran Belanja BPBD Kabupaten Pulau Morotai tersebut terbagi atas:
  - 1) Belanja Operasi, target anggaran sebesar Rp. 4.908.518.518,00 direalisasi sebesar Rp. 4.730.533.667,00 selisih anggaran belanja sebesar Rp. 177.984.851,00.-
  - 2) Belanja Pegawai, target anggaran sebesar Rp. 5.813.423.199,00 direalisasi sebesar Rp. 4.925.735.648,00 selisih anggaran belanja sebesar Rp. 887.687.551,00
  - 3) Belanja Barang dan Jasa, target anggaran sebesar Rp. 1.614.100.920,00 direalisasi sebesar Rp. 1.588.417.437,00

selisih anggaran belanja sebesar Rp.25.683.483,00

- 4) Belanja Modal Rehabilitasi dan Rekonstruksi, target anggaran sebesar Rp. 2.924.312.133,00 direalisasi sebesar Rp.2.924.312.000,00 selisih anggaran belanja sebesar Rp. 133,00.-
  - 5) Belanja Modal Talud dan Bronjong, target anggaran sebesar Rp. 1.124.000.000,00 direalisasi sebesar Rp. 1.089.000.000,00 selisih anggaran belanja sebesar Rp. 35.000.000,00.-
  - 6) Belanja modal stimulus bangunan rumah, target anggaran sebesar Rp. 877.574.000,00 direalisasi sebesar Rp.877.574.000,00 selisih anggaran belanja sebesar Rp. 0,00.-
4. Masih ada program atau item kegiatan yang belum terealisasi sehingga BPBD Kabupaten Pulau Morotai mengalami surplus/defisit sebesar Rp. 9.609.404.651,00. Pada tahun 2018 target anggaran belanja BPBD Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp. 9.834.404.651,00 yang direalisasi sebesar Rp. 9.621.419.667,00 selisih anggaran belanja sebesar Rp. 212.984.984,00.
 

Anggaran Belanja BPBD Kabupaten Pulau Morotai tersebut terbagi atas:

    - 1) Belanja Operasi, target anggaran belanja Rp. 4.908.518.518,00 direalisasi sebesar Rp. 4.730.533.667,00 selisih anggaran belanja sebesar Rp. 177.984.851,00.-
    - 2) Belanja Pegawai, target anggaran belanja Rp. 3.294.417.598,00 direalisasi sebesar Rp.3.142.116.230,00 selisih anggaran belanja sebesar Rp.152.301.368,00.-
    - 3) Belanja Barang dan Jasa, target anggaran sebesar Rp. 1.614.100.920,00 direalisasi sebesar Rp. 1.588.417.437,00 selisih anggaran belanja sebesar Rp.25.683.483,00.-

- 4) Belanja Modal Rehabilitasi dan Rekonstruksi, target anggaran sebesar Rp. 2.924.312.133,00 direalisasi sebesar Rp. 2.924.312.000,00 selisih anggaran belanja sebesar Rp. 133,00.-
- 5) Belanja Modal Talud dan Bronjong, target anggaran sebesar Rp. 1.124.000.000,00 direalisasi sebesar Rp. 1.089.000.000,00 selisih anggaran belanja sebesar Rp. 35.000.000,00.-
- 6) Belanja modal stimulus bangunan rumah, target anggaran sebesar Rp. 877.574.000,00 direalisasi sebesar Rp. 877.574.000,00 selisih anggaran belanja sebesar Rp. 0,00.-

Anggaran belanja BPBD Kabupaten Pulau Morotai tahun 2018 mengalami penurunan belanja pegawai disebabkan adanya mutasi atau ruling pejabat dan pegawai untuk dilakukan penyegaran berdasarkan dengan analisis jabatan. Pada tahun 2019 target anggaran belanja BPBD Kab. Pulau Morotai sebesar Rp. 15.167.726.000,00 yang direalisasi sebesar Rp. 13.130.014.000,00 selisih anggaran belanja sebesar Rp. 2.037.712.000,00.

Anggaran Belanja BPBD Kabupaten Pulau Morotai tersebut terbagi atas:

- 1) Belanja Operasi, target anggaran belanja Rp. 4.908.518.518,00 direalisasi sebesar Rp. 4.730.533.667,00 selisih anggaran belanja sebesar Rp. 177.984.851,00.-
- 2) Belanja Pegawai, target anggaran belanja Rp. 7.118.902.949,00 direalisasi sebesar Rp. 6.924.238.242,00 selisih anggaran belanja sebesar Rp. 194.664.707,00.-
- 3) Belanja Barang dan Jasa, target anggaran sebesar Rp. 1.614.100.920,00 direalisasi sebesar Rp. 1.588.417.437,00 selisih

anggaran belanja sebesar Rp. 25.683.483,00.-

- 4) Belanja Modal Rehabilitasi dan Rekonstruksi, target anggaran sebesar Rp. 2.924.312.133,00 direalisasi sebesar Rp. 2.924.312.000,00 selisih anggaran belanja sebesar Rp. 133,00.-
- 5) Belanja Modal Talud dan Bronjong, target anggaran sebesar Rp. 1.124.000.000,00 direalisasi sebesar Rp. 1.089.000.000,00 selisih anggaran belanja sebesar Rp. 35.000.000,00.-
- 6) Belanja modal stimulus bangunan rumah, target anggaran sebesar Rp. 877.574.000,00 direalisasi sebesar Rp. 877.574.000,00 selisih anggaran belanja sebesar Rp. 0,00.-

Anggaran belanja BPBD Kabupaten Pulau Morotai tahun 2019 mengalami penambahan yang sangat signifikan pada item kegiatan atau program belanja pegawai disebabkan adanya mutasi atau ruling pejabat sesuai dengan analisis jabatan.

## KESIMPULAN

1. Hasil analisis rasio efisiensi menunjukkan rata-rata tingkat efisiensi pengelolaan anggaran pada BPBD Kabupaten Pulau Morotai selama tahun 2017 sampai 2019 adalah 1,16%, artinya pengelolaan anggaran terlaksana sangat efisien. Pengelolaan anggaran belanja sudah memenuhi syarat efisiensi, yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil maksimum.
2. Hasil analisis rasio efektifitas menunjukkan rata-rata rasio efektifitas pengelolaan anggaran belanja BPBD Kabupaten Morotai tahun 2017 sampai 2019 sebesar 97,27%, artinya pengelolaan anggaran sudah memenuhi kriteria efektif karena realisasi anggaran yang sudah mendekati target anggaran yang telah ditetapkan.

3. Pada tahun 2017 dan 2019 rasio efektivitasnya masih cukup efektif karena realisasi anggaran belanja memiliki perbedaan yang jauh dengan target anggaran belanja yang harus dicapai. Perbedaan ini terjadi karena ada beberapa kegiatan yang dianggarkan tidak terlaksana.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, 2007, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi I, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Baswir, 2007, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga, Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Baswir, Revrison, 2005, *Akuntansi Pemerintah Indonesia*, BPFE, Yogyakarta.
- Deddi dan Ayuningtyas, 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua, Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Darise, 2006, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Edisi Ketujuh, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Davey, K.J., 2000. *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. Terjemahan oleh Amirullah. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Garrison, Norren and Brewer, 2007, *Management Leading and Collaborating in a Competitive world 7th ed*. Mc Graw hill, NY.
- Gasperz, 2008, *Total Quality Manajemen*. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Halim, Abdul, 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat Media. Jakarta.
- Halim, Abdul, 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta.
- Halim, Abdul, 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Salemba Empat: Jakarta.
- Harun, 2008. *Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Herawati dan Sunarto, 2004, *Budgetting, Penganggaran dan Perencanaan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ihyaul, 2009, *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia*. BPFE, UBM Yogyakarta.
- Jones, R dan M. Pendlebury. 2006. *Public Sector Accounting*. 5<sup>th</sup> Edition. Pitman Publishing, London
- Julita dan Jufrizen, 2012. *Budgeting*. Penerbit Cita pustaka Media Perintis. Bandung.
- Julita, 2013, *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara*, Tesis, PPs UNHAS, Makassar (Tidak Dipublikasikan).
- Kurniawan, 2005, *Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan*. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Lukman Wahid, 2011, *Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Efektifitas Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada Biro Keuangan Propinsi Sulawesi Selatan*. Tesis, PPs UNHAS, Makassar (Tidak Dipublikasikan).
- Mamesah, D.J., 2005. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Mulyadi, 2006, *Sistem Akuntansi*, Salemba Empat, Jakarta.
- Munandar, 2006, *Manajemen Keuangan Modern (Analisis, Perencanaan, dan Kebijakan)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mustopadidjaya, 2007, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Nafarin, M., 2004. *Penganggaran Perusahaan*. Edisi Ketiga, Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Nur Mawati Mambulu, 2010, *Analisis Efektifitas dan Efisiensi*

- Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai. Tesis, PPs UNHAS, Makassar (Tidak Dipublikasikan).
- Rowan, Rowan dan Pendlebury, Maurice. 2002. *Public Sector Accounting*, 5th Edition. UK
- Prentice Hall. Salam, S. Dharma, 2002, Manajemen Pemerintahan Indonesia. Djambatan, Jakarta.
- Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus, 2004. Ilmu Makro ekonomi. Media Global Edukasi, Jakarta.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Cetakan Pertama. Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Siagian, P. Sondang, 2007, Manajemen Sumber Daya Manusia ,Edisi Pertama, Cetakan Keempat belas, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Siagian, P. Sondang 2001. Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, Gunung Agung, Jakarta.
- Suparmoko, 2007, Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek, BP2E, Yogyakarta.
- Sustry Ambarriani, 2005, Manajemen Biaya: Dengan Tekanan Strategik. Edisi dua. Salemba Empat. Jakarta.
- Simamora, 2007, Manajemen Operasional, Ghalia, Indonesia.
- Ulum, Ihyaul, 2004. Audit Sektor Publik Suatu Pengantar. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.
- Yani, Achmad, 2008, Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah di Indonesia, Rajawali, Jakarta.
- Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.  
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang mengalami perubahan menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan